

54

KERUSUHAN AMBON SUATU TINJAUAN KONFLIK NORMA TINGKAH LAKU (THE CONFLICT OF CONDUCT NORMS)

Oleh :

IPTU Azwar, S. Sos

Mhs. Pasca Sarjana (S-2) Kriminologi

FISIP - UNIVERSITAS INDONESIA

2000 / 2001

I. GAMBARAN UMUM KOTA AMBON DAN SEKITARNYA

Kota Ambon sebagai ibukota propinsi Maluku mempunyai fungsi yang sentral dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik bagi propinsi Maluku. Sebagai sebuah propinsi terbuka untuk semua warga masyarakat Indonesia, kota Ambon juga mempunyai sentral dalam berbagai percaturan sosial, ekonomi dan politik dari masyarakat-masyarakat lokal setempat maupun dari propinsi-propinsi yang terletak di sekelilingnya terutama Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Kerusuhan di Ambon yang menurut kalangan umum atau pemerintah dimana datangnya tidak terduga, ternyata telah menjadi peristiwa besar dan telah banyak menelan korban jiwa serta harta benda yang tidak terhitung jumlahnya. Hal tersebut telah memporakporandakan segi-segi kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Ambon. Peristiwa yang hanya bermula dari sebuah perkelahian biasa di pagi hari menyongsong Hari Raya Idul Fitri tanggal 22 Nopember 1998, dimana ada dugaan dibalik peristiwa tersebut telah terjadi rekayasa politik oleh kelompok tertentu yang berusaha mengadu domba antar etnis.

Hingga saat ini kota Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya masih mempunyai potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat meledak. Peristiwa Ambon

sejak terjadinya pada tanggal 22 Nopember 1998 hingga saat ini telah menelan korban yang cukup banyak :

- a. Korban jiwa MD. 159 Orang
- b. Luka berat 217 Orang
- c. Luka ringan 209 Orang
- d. Kerugian materiil Lebih Kurang Rp.500 Milyar

(Laporan Staf Intelejen Polri)

Berdasarkan data kependudukan di Kodya Ambon dengan perincian sebagai berikut :

- a. Islam 132.215 jiwa (42,38%)
- b. Kristen Protestan 161.977 jiwa (51,92%)
- c. Katolik 17.315 jiwa (5,55%)
- d. Lainnya 797 jiwa (0,25%)

(H.D. Brototanoyo, 2001 : 74)

Sedangkan data jumlah penduduk berdasarkan golongan pemeluk agama di provinsi Maluku yang berjumlah 2.088.518 jiwa adalah sebagai berikut :

- a. Islam 1.232.433 jiwa (59,01%)
- b. Kristen Protestan 757.037 jiwa (35,29%)
- c. Katolik 108.394 jiwa (5,19%)
- d. Lainnya 10.651 jiwa (0,51%)

(H.D. Brototanoyo, 2001 : 74)

Berdasarkan pengelompokan golongan agama, penduduk Ambon terdiri atas dua golongan utama yaitu yang beragama Islam dan Kristen. Sedangkan yang beragama Katolik jumlahnya tidak sebanding dengan yang beragama Islam dan Kristen. Secara pranata, Gereja Katolik lebih tuah apabila dibandingkan dengan penganut Islam dan

Kristen Protestan. Pengikut Islam dan Kristen Protestan masing-masing terdiri atas aliran-aliran dari yang moderat sampai dengan yang fanatik berkenaan dengan keyakinan keagamaan dan hubungannya dengan agama-agama lainnya. Gereja Katolik dalam berbagai konflik mengambil posisi moderat dibandingkan dengan umat Protestan dan Umat Islam.

Pembagian wilayah kota Ambon dan kebudayaan secara garis besarnya dimana desa-desa di Ambon dibagi dalam dua wilayah yaitu desa-desa pantai utara di Jazirah Leihitu yang beragama Islam dan Jazirah Leitimur. Pusat kebudayaan Islam di Ambon adalah Haitu, yang merupakan pemukiman tua dengan tradisi-tradisi Islam yang berorientasi ke Jepara, merupakan tradisi sebelum abad 21. Sedangkan pusat kebudayaan Kristen adalah beberapa kampung tua di Ambon dan Soya. Bahkan Soya yang terletak di pinggiran kota Ambon mempunyai mitologi yang mengacu ke Kerajaan Majapahit (H.D. Brototano, 2001 : 75).

Warga di desa-desa pulau Ambon bagian Selatan yang beragama Islam pada umumnya adalah para petani keturunan orang Buton (Sulawesi Tenggara), dimana nenek moyangnya telah lama datang dan bermukim di desa-desa tersebut. Mereka hidup saling tolong menolong dengan warga desa yang orang Ambon asli. Sebagian mereka terikat dalam hubungan kekerabatan *pelagandong* dengan sesama warga asal Ambon setempat.

Ambon dibawah kekuasaan VOC, berdasarkan sejarah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Ambon sebelum VOC menguasai Ambon, pulau Ambon dikuasai oleh bangsa Portugis karena Ambon terkenal dengan penghasil rempah-rempah. Selanjutnya VOC datang ke Ambon untuk hal yang sama yaitu berdagang rempah-rempah sehingga terjadi

persaingan Portugis dengan Belanda (VOC). Dalam persaingan tersebut VOC menang dan Ambon dikuasai oleh VOC.

Jenis suku bangsa yang ada di Ambon terdiri dari : Ambon, Lease, Seram, Buru dan Banda, suku-suku lainnya Jawa, Bugis, Toraja, Buton dan Makasar (BBM) merupakan masyarakat mayoritas dibandingkan dengan penduduk asli asal Ambon baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Mereka menguasai tempat-tempat perekonomian dan pasar, secara politik lokal dan nasional mereka menguasai berbagai kebijaksanaan penguasaan dan pendistribusian sumber-sumber daya yang ada di Ambon. (H.D. Brototano, 2001:75).

Adanya stereotipe yang dikembangkan terhadap orang Ambon sebagai orang pemalas, hanya menghabiskan uang dan waktu untuk minum-minum sampai mabuk, gengsi tinggi dan tidak mau kerja kasar (tidak mau berjualan, apalagi berjualan di kaki lima, tidak mau menjadi cleaning service, tidak mau menjadi kuli pengangkut barang, tidak mau menjadi tukang becak dan sebagainya), maunya menjadi pegawai negeri atau TNI walau gaji kecil tetapi gengsi tinggi. Sebaliknya orang-orang Bugis, Buton dan Makasar adalah pekerja keras dan rajin, mau mengerjakan apa saja dan merekalah yang membangun kota Ambon. Tetapi masyarakat Ambon juga mempunyai stereotipe terhadap orang-orang Bugis, Buton dan Makasar yaitu sebagai preman dan mafia. (H.D. Brototano, 2001 : 76).

II. KONFLIK NORMA TINGKAH LAKU

Berbagai kelompok sosial yang ada, pasti memiliki norma dan tingkah laku yang kompleks. Nilai-nilai sosial yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat akan mengalami perbedaan antara nilai yang satu

dengan nilai yang lainnya. Adanya fenomena perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya (migrasi) akan membawa konsekuensi berpindah pula suatu norma atau nilai ke tempat lain, dimana masyarakat/individu tersebut berpindah (migrasi). Mereka pasti akan membanding-bandingkan antara nilai/norma yang mereka miliki dengan nilai/norma di tempat mereka datang (nilai/norma masyarakat asli). Konflik-konflik budaya semacam itu, tidak bisa dihindari bila norma-norma/nilai-nilai suatu kultur atau subkultur saling memiliki sifat superior yang berlebihan dan tidak mampu untuk beradaptasi secara baik.

Sebuah krisis merupakan sebuah kegagalan yang selanjutnya akan mengakibatkan konflik-konflik. Dalam hal ini kita dapat bercermin dengan apa yang menimpa Yugoslavia, dimana negara tersebut menjadi terpecah-pecah yang disebabkan oleh konflik kekerasan antar etnis. Semestinya kita, khususnya pemerintah mencegah meluasnya konflik kekerasan antar etnis. Disamping beratnya derita kemanusiaan yang ditimbulkannya, konflik kekerasan semacam ini akan menyeret negara masuk kedalam krisis yang mendalam lagi.

Apalagi negara kita Indonesia adalah negara kepulauan, beraneka ragam budaya, agama, norma maupun pola tingkah laku. Melihat kondisi seperti ini, bangsa Indonesia mempunyai potensi konflik dan sangat rentan sekali. Untuk itu sangat perlu adanya rasa solidaritasm, integrasi dan adaptasi yang tinggi terhadap kemajemukan yang ada di negara kita ini.

Konflik kekerasan antar etnis betapapun sulit dan rumitnya harus dapat dicegah agar jangan sampai meluas, sekali meluas masalahnya menjadi sulit untuk ditangani. Konflik kekerasan yang sudah terjadi dapat menjadi salah satu sumber utama konflik

berikutnya. Masyarakat menjadi terpolarisasi dalam kutub-kutub yang senantiasa berhadapan dengan rasa curiga-mencurigai. Oleh sebab itu, tindakan yang paling awal untuk mencegah terjadinya konflik adalah mengidentifikasi apa yang menjadi akar konflik tersebut. (Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2001 : 213).

Lebih lanjut Ronny R. Nitibaskara menjelaskan bahwa secara umum penyebab konflik ada dua. Yang *pertama*, faktor struktural adalah faktor yang bersifat jangka panjang dan membentuk kondisi yang kondusif bagi meletusnya suatu konflik kekerasan antar etnis seperti, kesenjangan ekonomi, budaya dan sebagainya. Kemudian *faktor kedua*, yaitu faktor mempercepat adalah tindakan para aktor di lapangan yang memiliki pengaruh yang dapat memicu meluasnya konflik. Secara teoritis, kendatipun faktor struktural sudah sedemikian matang untuk terjadinya konflik kekerasan tetapi kalau tidak dipicu oleh tindakan para aktor ini, konflik tidak akan meledak. (Tb. Ronny Rahman Nitibaskara 2001 : 213).

Secara umum fase-fase kekerasan antar etnis meliputi empat fase : *Fase pertama*, tahap pendahuluan dimana faktor struktural telah menjadi lahan subur yang kondusif untuk meledaknya konflik kekerasan antar etnis. Hanya sedikit orang yang memahami secara sadar keadaan yang berkembang dan keadaan yang menjadi sangat berbahaya, jika ada orang-orang yang sampai memanipulasi keadaan tersebut menjadi meluas. *Fase kedua*, yaitu tahap titik didih pada tahap ini faktor struktural penyebab konflik kekerasan telah benar-benar kondusif bagi meledaknya konfrontasi terbuka antar etnis yang saling memendam rasa permusuhan. Tindakan saling melecehkan simbol-simbol etnis pada fase ini lebih terbuka. *Fase ketiga*, yaitu konflik kekerasan antar etnis secara terbuka telah

hindar dari berbagai konflik dan serangan yang dilakukan oleh desa-desa yang menjadi pasangan Pelanya. UU No. 5 Tahun 1974 tidak banyak mencerminkan pembentukan suatu desa berdasarkan ikatan budaya (kultural) dan lebih mementingkan pada aspek administratif kebijakan. Konflik dan perselisihan yang terjadi lebih ditekankan pada pendekatan yuridis formal, pada hal secara sosial budaya masyarakat Ambon mempunyai potensi budaya dalam penyelesaian konflik yang tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan penyelesaian secara yuridis formal. Pemanfaatan hukum adat atau kebiasaan daerah dalam penyelesaian konflik atau pertentangan, merupakan salah satu solusi agar konflik jangan sampai meluas. Ada daerah, dimana hukum adat atau kebiasaan masyarakat adat dapat menyelesaikan permasalahan konflik. Jadi tidak hanya hukum positif saja yang bisa menyelesaikan konflik, terutama konflik budaya dan nilai-nilai. Berdasarkan salah satu premis dari Thorsten Sellin sebab timbulnya suatu konflik, maka pemaksaan suatu hukum baik itu hukum adat maupun hukum positif terhadap masyarakat lain yang pada dasarnya mempunyai norma hukum yang berbeda dapat memicu timbulnya suatu konflik. Begitu pula halnya dengan masyarakat Bugis, apabila harga diri, harkat dan martabatnya tersinggung akan dapat menjurus ke arah siri, disatu sisi bagi masyarakat Ambon tidak ada mengenal siri dalam norma perilaku maupun hukum adatnya dan pemaksaan norma serta pemahaman siri ke dalam masyarakat Ambon yang notabene daerahnya sendiri belum bisa diterima oleh masyarakat Ambon. Berbenturan antara dua norma hukum adat ini telah memicu suatu konflik budaya.

III. BILA ANGGOTA DARI SALAH SATU KELOMPOK BERPINDAH/ MASUK KE KELOMPOK LAINNYA.

Berbagai macam kejadian telah melanda Ambon dan sekitarnya mulai dari pembakaran, pembunuhan, penganiayaan, penyerangan, penjarahan sampai pengungsian. Hal tersebut sangat memprihatinkan. Secara kependudukan orang-orang Bugis, Buton dan Makasar adalah masyarakat pendatang dan penduduk mayoritas dibandingkan dengan penduduk asli asal Ambon, baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Mereka menguasai tempat-tempat umum dan pasar sehingga warga masyarakat asal hanya sebagai konsumen dan pengguna jasa. Secara politik lokal dan nasional mereka menguasai berbagai kebijaksanaan dan pendistribusian sumber-sumber daya alam yang ada di Ambon. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan penduduk pendatang lebih dominan daripada penduduk asli. Ekonomi kota dan kesempatan kerja yang makin tidak seimbang mengakibatkan adanya anggapan atau cap kepada penduduk asli Ambon oleh penduduk pendatang bahwa orang Ambon pemalas, hanya menghabiskan uang untuk foya-foya dan minum-minum, mabuk-mabukan, gengsi tinggi dan tidak mau kerja kasar. Dan sebaliknya penduduk pendatang khususnya Bugis, Buton dan Makasar mendapat cap dari penduduk asli sebagai preman dan mafia. Dari gambaran tersebut jelas bahwa antara penduduk asli Ambon dengan penduduk pendatang khususnya Buton, Bugis dan Makasar telah terjadi suatu jarak kedua suku tersebut. Sebagian penduduk pendatang ada yang tidak berhasil di daerah Ambon sehingga mereka melakukan apa saja untuk melanjutkan kehidupannya, sehingga stereotipe terhadap masyarakat pendatang oleh masyarakat asli

Ambon yang beranggapan bahwa penduduk pendatang adalah preman dan mafia. Hal tersebut telah membuat rasa tidak aman secara merata dan menyeluruh pada warga masyarakat asli Ambon. Anggapan-anggapan tersebut telah menimbulkan curiga mencurigai dan pada akhirnya mengakibatkan disintegrasi sosial.

Hal itu lebih diperuncing lagi ketika terjadi konflik di kota Ambon dan sekitarnya. Pertentangan antara masyarakat Bugis, Buton dan Makasar dengan masyarakat asli Ambon lebih menonjolkan pada nilai-nilai budaya masyarakat masing-masing. Hal hasil konflik yang kecil pada dasarnya bisa diselesaikan secara pemahaman budaya masing-masing menjadi lebih meluas dan menjurus ke arah sara. Pemaksaan suatu nilai budaya dari masyarakat pendatang kepada masyarakat asli begitu juga sebaliknya, pada umumnya sering menimbulkan bentrokan nilai. Apalagi kalau nilai budaya masing-masing masyarakat tersebut tidak bisa akomodatif, permisif dan tidak saling memahami. Berdasarkan salah satu premis dari teori Thorsten Sellin tersebut di atas dapat diasumsikan bahwa adanya korelasi konflik terjadi di Ambon dan sekitarnya terjadi akibat benturan nilai-nilai budaya yang tidak akomodatif dan permisif masuk atau dibawa ke dalam budaya masyarakat lainnya yang berbeda.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

a. Kesimpulan.

1. Kerusuhan Ambon yang sangat mendalam dan membawa dampak psikologis bagi masyarakat yang bertikai merupakan salah satu bentuk konflik yang ditimbulkan oleh norma tingkah laku yang

tidak bisa adaptif, permisif dan tidak akomodatif.

2. Pada umumnya penduduk Ambon, pulau Lease dan masyarakat pendatang cenderung untuk hidup mengelompok berdasarkan agama dan adat-istiadat, penduduk yang mayoritas beragama Kristen ada di wilayah Kudamati, Soya, Batu Gajah dan Silale sedangkan penduduk mayoritas beragama Islam banyak berdomisili di Batu Merah. Adanya pengelompokan masyarakat tersebut dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Masyarakat yang fanatik kemudian tinggal secara homogen pada suatu daerah sesuai dengan agamanya, bisa menimbulkan fanatisme yang sempit, mudah terprovokasi dan tersulut sehingga peristiwa kecil dan sepele bisa menjurus ke arah konflik yang besar atau Sara. Daerah Batu Merah dimana masyarakatnya banyak yang berasal dari Bugis, Buton dan Makasar dan mayoritas beragama Islam sedangkan di daerah Kudamati merupakan daerah mayoritas masyarakat asli Ambon dan mayoritas beragama Kristen. Munculnya isu sara telah menyulut kedua daerah yang berdekatan tersebut menjadi kancah konflik. Pada saat terjadi konflik di Ambon masyarakat selalu mempertahankan daerahnya masing-masing. Ditarik suatu asumsi bahwa konflik di Ambon muncul karena perbenturan nilai-nilai budaya pada suatu daerah perbatasan (berdekatan), dimana budaya dan nilai-nilai masyarakat yang berada pada daerah yang berbatasan (berdekatan) tersebut saling bertentangan dan kurang adaptif.

3. Posisi sentral kota Ambon sebagai ibukota Maluku tidak terlepas dari pada pengaruh politik secara nasional. Sadar atau tidak sadar dengan diberlakukannya sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No. 5 tahun 1979 secara perlahan telah menghancurkan hak budaya

masyarakat dan merubah berbagai pola kebudayaan Ambon yang dalam tradisinya menekankan persatuan dan kesatuan serta kemajemukan. Masyarakat pulau Ambon dan pulau-pulau Lease disekitarnya telah lama memegang tradisi kemajemukan didalam menata kehidupan masyarakatnya. Budaya kerjasama merupakan tradisi mereka yang lebih mementingkan persatuan dan kesatuan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan hubungan darah yang dikenal dengan "Pela". Dalam tradisi tersebut perbedaan-perbedaan dijumpai oleh penggunaan idiom *saudara sedarah atau saudara sekandung (Pelagandong)*. UU No. 5 Tahun 1974 tidak banyak mencerminkan pembentukan suatu desa berdasarkan ikatan budaya (kultural) dan lebih mementingkan pada aspek administratif kebijakan. Konflik dan perselisihan yang terjadi lebih ditekankan pada pendekatan yuridis formal, pada hal secara sosial budaya masyarakat Ambon mempunyai potensi budaya dalam penyelesaian konflik. Ada daerah, dimana hukum adat atau kebiasaan masyarakat adat dapat menyelesaikan permasalahan konflik. Jadi tidak hanya hukum positif saja yang bisa menyelesaikan konflik, terutama konflik budaya dan nilai-nilai. Begitu juga pemaksaan suatu hukum baik itu hukum adat maupun hukum positif terhadap masyarakat lain yang pada dasarnya mempunyai norma hukum yang berbeda dapat memicu timbulnya suatu konflik.

4. Secara kependudukan orang-orang Bugis, Buton dan Makasar adalah masyarakat pendatang dan penduduk mayoritas dibandingkan dengan penduduk asli asal Ambon, baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan penduduk pendatang lebih dominan dari pada penduduk asli. Ekonomi kota dan kesempatan kerja yang makin

tidak seimbang mengakibatkan adanya anggapan atau cap kepada penduduk asli Ambon oleh penduduk pendatang bahwa orang Ambon pemalas, hanya menghabiskan uang untuk foya-foya dan minum-minum, mabuk-mabukan, gengsi tinggi dan tidak mau kerja kasar. Dan sebaliknya penduduk pendatang khususnya Bugis, Buton dan Makasar mendapat cap dari penduduk asli sebagai preman dan mafia. Steriotipe terhadap masyarakat pendatang oleh masyarakat asli Ambon yang beranggapan bahwa penduduk pendatang adalah preman dan mafia, Anggapan-anggapan tersebut telah menimbulkan curiga mencurigai dan pada akhirnya mengakibatkan disintegrasi sosial. Pertentangan antara masyarakat Bugis, Buton dan Makasar dengan masyarakat asli Ambon lebih menonjolkan pada nilai-nilai budaya masyarakat masing-masing. Pemaksaan suatu nilai budaya dari masyarakat pendatang kepada masyarakat asli begitu juga sebaliknya, pada umumnya sering menimbulkan bentrokan nilai. Apalagi kalau nilai budaya masyarakat tersebut dibawa ke dalam budaya masyarakat lainnya yang berbeda dan tidak bisa akomodatif, permisif dan tidak saling memahami.

b. Saran-Saran.

1. Sikap akomodatif, permisif dan adaptif sangat diperlukan, terutama terhadap masyarakat pendatang sebagaimana bunyi salah satu pribahasa "Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung". Pribahasa tersebut mengajak kita untuk bisa menerima fakta sosial secara arif dan bijaksana dimana kita berada.

2. Perlu adanya pencegahan konflik dan pengembangan situasi damai yang meliputi peningkatan stabilitas dalam berbagai bidang; ekonomi, sosial dan politik. Pencegahan konflik secara kompre-

hensif menuntut kebijakan yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek, perlu mencermati aktor-aktor yang potensial memunculkan konflik baru. Tindakan penting bagi pencegahan konflik adalah kemampuan untuk mengidentifikasi akar konflik dan memonitor sebab-sebab struktural dalam peristiwa-peristiwa pencetus konflik kekerasan kemudian menganalisa dan merumuskan penanganannya.

3. Resolusi-resolusi damai dan upaya-upaya islah harus terus diupayakan sambil membenahi sektor-sektor yang mengalami kerusakan. Penempatan aparat keamanan dalam jumlah yang cukup serta terkendali tetap dipertahankan, sekalipun konflik kekerasan terlihat di permukaan mengalami proses menuju peredaan. Konflik setiap waktu dapat mengarah kepada timbulnya konflik baru, maka sedini mungkin harus ditangkal. Untuk itu pelucutan senjata tajam atau alat-alat kekerasan lainnya terus dilanjutkan.

4. Upaya untuk mendorong agar otoritas-otoritas dari lembaga-lembaga tradisional dari para pihak yang terlibat konflik mau membuat rekonsiliasi. Bilamana peran institusi-institusi tradisional sangat kuat, maka peran pemerintah hanya memperkuat dan memperteguh sikap serta kemauan para pemimpin tradisional untuk secara sungguh-sungguh membantu penyelesaian konflik.

5. Media massa harus mau membantu menurunkan suhu konflik, khususnya dari media massa lokal yang banyak dibaca oleh masyarakat yang terlibat konflik. Perlu diingat bahwa ketegangan lokal yang membuah konflik, seringkali hanya ditimbulkan oleh salah informasi serta salah pengertian. Media-media nasional yang independen dihimbau untuk menurunkan berita menge-

nai konflik secara fair, akurat, menyejukkan dan membuat opini-opini yang memberikan alternatif penyelesaian konflik sekalipun baru dalam tataran ide.

6. Peranan elemen-elemen hukum sangat penting untuk mencegah konflik dan untuk membangun rekonsiliasi. Disamping itu hukum harus bermain diantara fungsi formal dan institusi tradisional sehingga hukum yang dijalankan dapat benar-benar diterima oleh para pihak yang saling berbenturan. Pemberlakuan hukum nasional harus benar-benar memperlihatkan aspek-aspek yang berkembang pada masyarakat lokal terutama dalam situasi konflik kekerasan. Untuk itu pengenalan kondisi sosiologis dan antropologis secara mendalam terhadap pihak-pihak yang berkonfrontasi sangat penting, sebelum mengetahui kondisi psikologis aktual mereka. Penegakan hukum harus memperhatikan dua kondisi yaitu sosiologis dan psikologis.

7. Untuk itu peran hukum adat beserta segenap institusinya dalam islah/rekonsiliasi sangat perlu dikedepankan atau dikemukakan selain menggunakan pendekatan yuridis formal sebagai alternatif terakhir. Pemaksaan hukum secara nasional dalam daerah konflik sering kali menimbulkan permasalahan baru, bukannya dapat menuntaskan situasi konflik ke jalan kedamaian.

8. Sifat dan sikap homogenitas dalam hidup berkelompok berdasarkan ras, agama dan kultural sudah seharusnya dilebur ke dalam sikap hidup yang heterogenitas. Pola hidup seperti itu akan dapat memberikan nuansa pembelajaran suatu masyarakat terhadap sifat dan kultur masyarakat lainnya yang berbeda. Hal itu diharapkan agar nantinya suatu masyarakat dapat memahami masyarakat lainnya serta belajar untuk dapat hidup dalam suasana keaneka ragaman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Thorsten Sellin, 1979, *The Conflict of Conduct Norms dalam Delos H. Kelly, Deviant Behavior, Reading in The Sociology of Deviance*, New York, ST. Martin's Press.

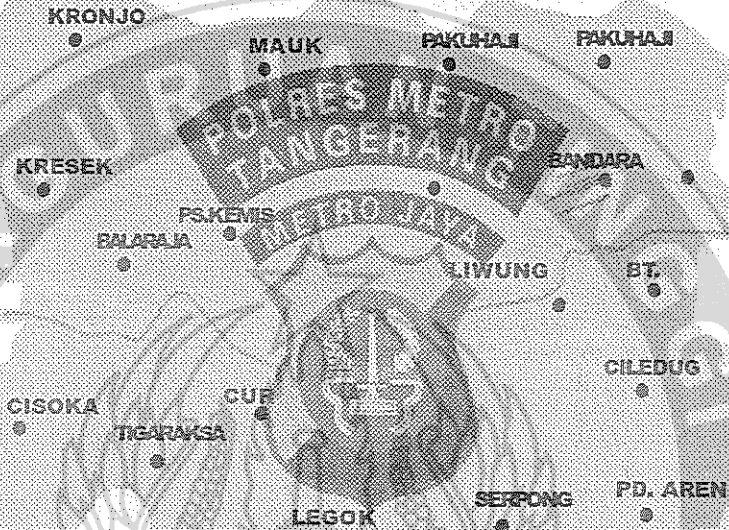
Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta, M2 Print.

H.D. Brototanoyo, 2001, *Kerusuhan Ambon dan Upaya Penanggulangannya*, Jakarta, Bulsak Edisi No. 10 Tahun 2001.

Marvin E. Wolfgang (Editor), *The Sociology of Crime and Delinquency*, New York, Jhon Wiley and Son Inc.

Martin S. Weinberg, 1981, *Devience The Interactionist Perspective*, New York, Macmillan Publishing Co., Inc.

“REBUT SIMPATI MASYARAKAT” MELALUI



5 PROGRAM, KAT YAN MAS POLRES TANGERANG

CATATAN REDAKSI:

Upaya Polri dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat harus diwujudkan oleh satuan-satuan Polri terutama Polres sebagai KOD dan Polsek sebagai ujung tombak.

Untuk memberikan rangsangan kepada satuan kewilayahan, redaksi memuat satu penjabaran dari salah satu Polres, yaitu, yaitu Polres Metro Tangerang yang telah menjabarkan Program Kat Yan Mas ke dalam 5 Program Kat Yan Mas dengan mengambil judul Rebut Simpati Masyarakat melalui 5 Program Kat Yan Mas Polres Tangerang.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA 5 Program yang dijabarkan adalah :

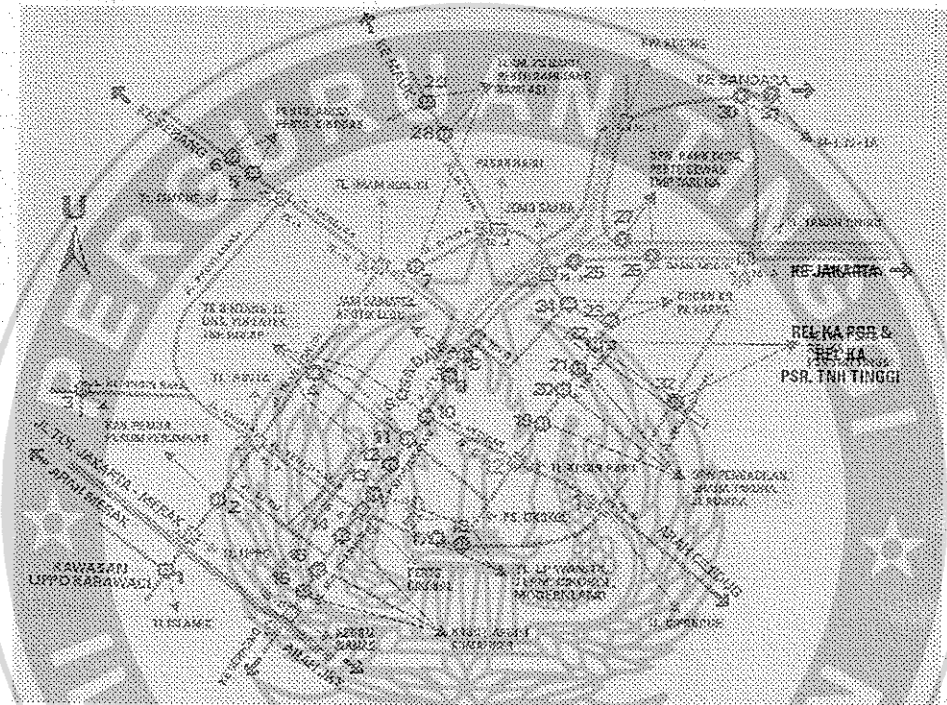
1. Program Satuan Lalin.
2. Program 3 S.
3. Program Polisi Masuk Sekolah.
4. Program Safari Jum'at.
5. Program Rayonisasi.

Masing-masing Program dijabarkan secara rinci mengenai sasaran, kekuatan personal, kegiatan / cara bertindak dan kodal.

Sesuai dengan kebijaksanaan Kapolri saat ini yaitu lebih menonjolkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, maka sudah sewajarnya masing-masing satuan melakukan kegiatan sesuai dengan arah kebijaksanaan Kapolri tersebut. Selamat bertugas.

Redaksi

1. PROGRAM GATUR LALIN



1. KETERANGAN / DATA :

- POS TETAP = 14 POS
- POS SEMENTARA = 32 POS

2. SASARAN

- JAM RAWAN PADA LOKASI
- SEKOLAH
 - PASAR
 - KANTOR
 - PERS. JALAN (LALIN PADAT)

3. KUAT PERSONIL

- POS TETAP = 64 PERS
- POS SEMENTARA = 77 PERS

4. GIAT / CB (CONSIGNES)

PENGATURAN DAN PENJAGAAN ARUS LALU LINTAS PADAT, MACET DAN RAWAN LAKA

5. KODAL / PADAL

- KODAL
- LAKS. KEGIATAN
 - LAPORAN KEGIATAN
 - ANEV

- PADAL
- PA YG DITUNJUK

1. KETERANGAN

- POS TETAP = 14 POS
 POS SEMENTARA = 32 POS

2. SASARAN

JAM RAWAN	LOKASI
1. 06.30 - 07.30	- SEKOLAH - PASAR - KANTOR
2. 13.00 - 15.00	- SIMPANG JL. (LALIN PADAT)
3. 16.00 - 20.00	- MACET

3. KUAT PERSONIL

KUAT PERS :

1. SABHARA	: 16	PERS
2. LANTAS	: 30	PERS
3. MIN. TAUD	: 5	PERS
4. BIMMAS	: 6	PERS
5. BENTENG	: 7	PERS

JML : 64 PERS

KUAT PERS :

1. SABHARA	: 24	PERS
2. LANTAS	: 24	PERS
3. MIN. TAUD	: 6	PERS
4. BIMMAS	: 2	PERS
5. BENTENG	: 20	PERS

JML : 77 PERS

4. GIAT / CB (CONSIGNES)

PENGATURAN & PENJAGAAN
PADA SASARAN :

- ARUS MACET
- ARUS PADAT
- RAWAN LAKA
- PERSIMPANGAN JALAN
- TMPT2 KERAMAIAAN (PSR,
PERTOKOAN & SEKOLAH

5. KODAL / PADAL

NO	NAMA/PANGKAT	POS
1.	IPDA HERMAWAN	1,2,3
2.	IPTU ARDIN H.	4,5,6
3.	IPTU WAGIMIN	7,8,9
4.	KANIT BIMMAS BENTENG	10,11,12,13
5.	IPDA SUGIANTO	14,15,16,17
6.	KAPOSPOL PERUMNAS	18,19,20
7.	IPDA SENIMIN	21,22,23
8.	IPTU AM SITOCHANG	24,25,26,27
9.	IPDA ERWIN S.	28,29,30,35
10.	IPTU ENDRO S.	31,32,33,34
11.	KAPOSPOL MODERNLAND	36,37,38,39
12.	KANIT SABHARA BENTENG	40,41,42,42
13.	IPTU MARYANTO	44,45,46
14.	KASAT LANTAS	
15.	KASAT SABHARA	
16.	KAPUSKODALOPS	
17.	KA/WAKAPOLRES	

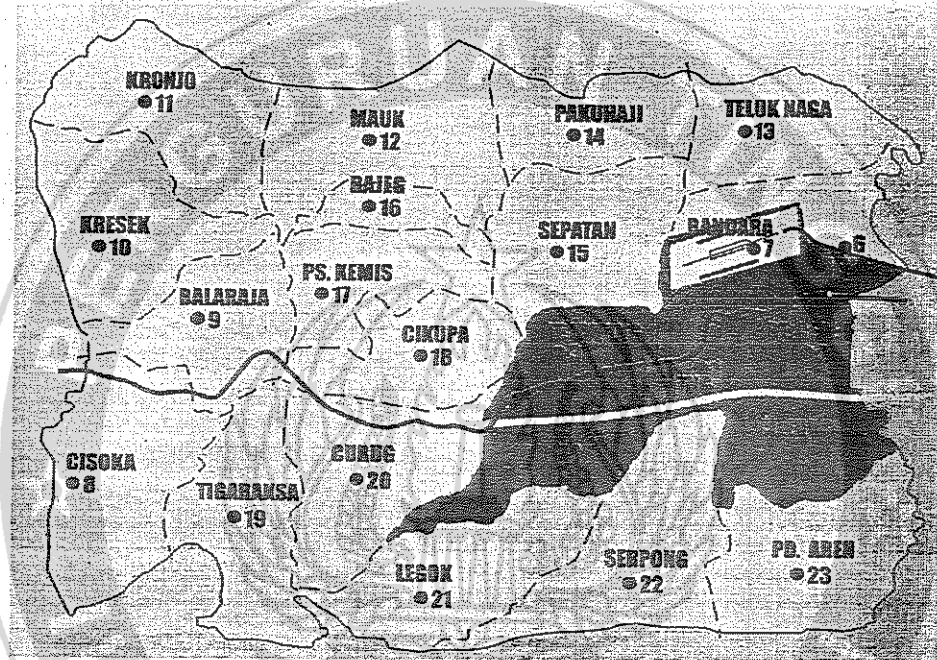
KODAL

- CEK LAPANGAN OLEH PADAL
- APEL RADIO / HT
- KONTROL LAPANGAN
- LAPORAN & ANEV OLEH PADAL

PADAL

- PARA PA TERSTRUKTUR
- KANIT
 - KAPOLSEK
 - KASAT
 - KABAGMIN
 - KAPOLRES

2. PROGRAM 3 S



BHAKTI - DHARMA - WASPADA

1. KETERANGAN / DATA :

- KODYA TNG. = 7 KEC/109 DS
- KAB. TNG. = 16 KEC/309 DS

2. SASARAN 3 S

- WARGA MASYARAKAT
- TODA, TOGA, TOMAS
- PEJABAT FORMAL
(LURAH/KADES, RT, RW)

3. KUAT PERS

- KODYA TNG. = 83 PERS
- KAB. TNG. = 267 PERS

SETIAP KELURAHAN / DESA
SATU ANGGOTA BABIN KAMTIBMAS/STAF

4. GIAT / CB (CONSIGNES)

- MELAKSANAKAN PATROLI, SAMBANG,
TATAP MUKA DAN MENYAMPAIKAN PESAN
- PESAN KAMTIBMAS KE KELURAHAN / DESA

5. KODAL / PADAL

- KODAL
- LAKS. KEGIATAN
- LAPORAN KEGIATAN
- ANEV

- PADAL
- PA YG DITUNJUK

1. KETERANGAN DATA

DATA KEC/KEL-DS KODYA TANGERANG			
NO	KEC	DS/LRH	KUAT
1.	TNG.	24	12
2.	BT. CEPER	15	14
3.	JT. UWUNG	17	17
4.	CILEDUG	23	16
5.	CIPONDOH	21	15
6.	BENDA	5	5
7.	BNDR SH	4	4
JUMLAH		109	83

DATA KEC/KEL-DS KODYA TANGERANG			
NO	KEC	DS/LRH	KUAT
8.	CISOKA	21	21
9.	BALARAJA	21	12
10.	KRESEK	18	18
11.	KRONJO	18	17
12.	MAUK	26	20
13.	TL. NAGA	23	18
14.	PAKUHAJI	14	13
15.	SEPATAN	16	16
16.	RAJEG	14	14
17.	PS. KEMIS	15	15
18.	CIKUPA	22	13
19.	TG. RAKSA	22	22
20.	SEPATAN	16	16
21.	LEGOK	24	24
22.	SERPONG	28	22
23.	PD. AREN	11	11
JUMLAH		309	267

2. SASARAN 3 S

- WARGA MASYARAKAT
- TODA, TOGA, TOMAS
- PEJABAT FORMAL
(LURAH/KADES, RT, RW)

3. KUAT PERS

- KODYA TNG. = 83 PERS
- KAB. TNG. = 267 PERS

4. GIAT / CB

1. PATROLI 10 KM/JAM (TEGUR, SAPA, SALAM)
2. PATROLI SAMBIL KOMUNIKASI (PINGGIR JL, PSR, WARUNG)
3. SANGANG (MENCARI INFORMASI)
4. TATAP MUKA (MEMBERIKAN INFORMASI)
5. PESAN-PESAN KAMTIBMAS (PENYULUHAN)

5. KODAL / PADAL

KODAL

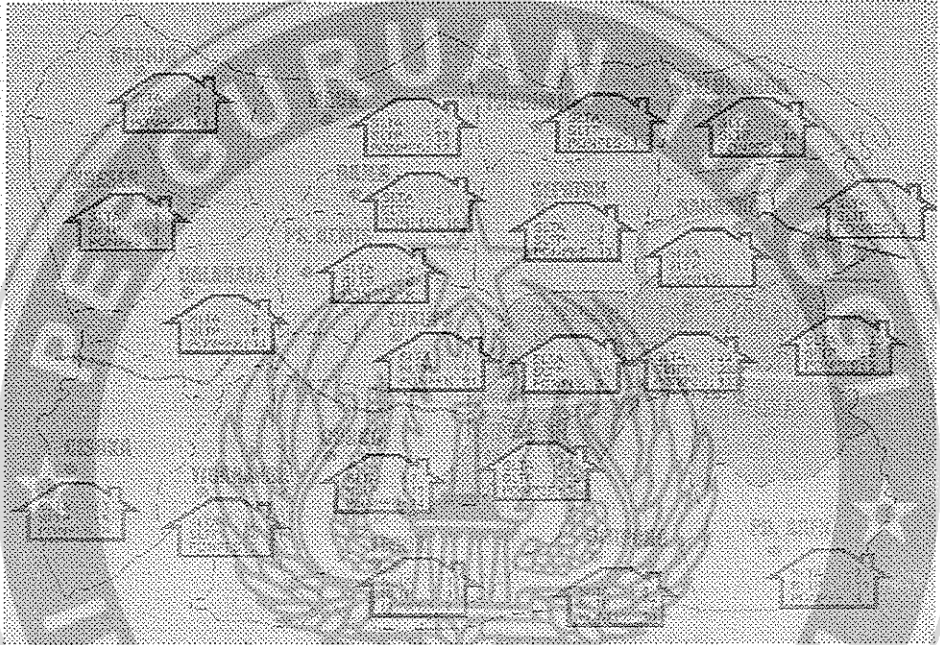
- LAKS. KEGIATAN
- LAPORAN KEGIATAN
- ANEV

PADAL

PARA PA TERSTRUKTUR

- KANIT
- KAPOLSEK
- KASAT
- KABAGMIN
- KAPOLRES

3. PROGRAM POLISI MASUK SEKOLAH



1. KETERANGAN / DATA :

- SEKOLAH SMU/SLTP
DI KODYA TNG. = 205 UNIT
- SEKOLAH SMU/SLTP
DI KAB. TNG. = 340 UNIT

2. SASARAN

- SEKOLAH YG SERING TERJADI TAWURAN
- ANTISIPASI LAHGUN NARKOBA
- MIRAS & SAJAM
- KENAKALAN REMAJA

3. KUAT PERS

- POLRES = 5 ORG
- POLSEK = 3 ORG

4. GIAT / CB (CONSIGNES)

- KOORDINASI DGN KEPSEK
- DI LAKS. SERENTAK 1 MINGGU SEKALI

5. KODAL / PADAL

KODAL

- LAKS. KEGIATAN
- LAPORAN KEGIATAN
- ANEV

PADAL

- PA YG DITUNJUK

1. KETERANGAN DATA

DATA SEKOLAH

NO	JENIS SKLH	KOTA	KAB.
1.	SLTA	64	43
2.	SLTP	109	108
3.	PONPES	32	180
	JUMLAH	205	340

2. SASARAN

- SEKOLAH YG SERING TERJADI TAWURAN
- ANTISIPASI LAHGUN NARKOBA
- MIRAS & SAJAM
- KENAKALAN REMAJA

3. KUAT PERS

PETUGAS / TIM :

POLRES : @ 5 ORG.

POLSEK : @ 3 ORG.

PIMP. TIM :

PA (KAPOLSEK S/D KANIT)

4. GIAT / CB (CONSIGNES)

1. H - 7 KOORDINASI DGN KEPALA SEKOLAH.

2. HARI H PUKUL 06.30 WIB TIBA DI SEKOLAH DGN GIAT:

A. TATAP MUKA & KOORDI RUJA KEPSEK

B. MENJADI PEMBINA UPACARA (MEMBACA AMANAT KAPOLRES).

C. DIALOG (10 GURU & PERWAKILAN SISWA + 50 SISWA).

D. MENGISI CEK LIST

3. DILAKSANAKAN :

- SECARA SERENTAK BAIK POLRES MAUPUN POLSEK

- 1 MINGGU 1 KALI SECARASELEKTIF & BERLANJUT

5. KODAL / PADAL

KODAL

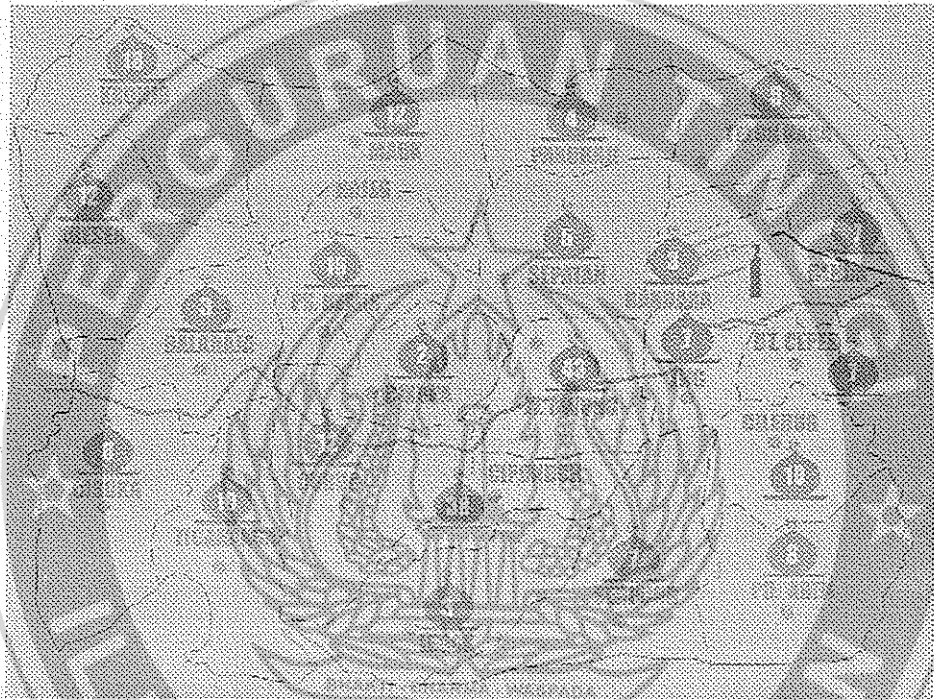
- LAKS. KEGIATAN
- LAPORAN KEGIATAN
- ANEV

PADAL

PARA PA TERSTRUKTUR

- KANIT
- KAPOLSEK
- KASAT
- KABAGMIN
- KAPOLRES

4. PROGRAM SAFARI JUM'AT



1. KETERANGAN / DATA :

- MASJID KODYA TNG. = 115 UNIT
- MASJID KAB. TNG. = 151 UNIT

2. SASARAN

- MASJID - SELEKTIF
PRIORITAS RAWAN KAMTIBMAS

3. KUAT PERS

- POLRES = 36 PERS
- POLSEK = 265 PERS

4. GIAT / CB (CONSIGNES)

- SHALAT BERJAMAAH BERSAMA
- SILATURAHMI
- PESAN KAMTIBMAS

5. KODAL / PADAL

KODAL

- LAKS. KEGIATAN
- LAPORAN KEGIATAN
- ANEV

PADAL

- PA YG DITUNJUK

1. KETERANGAN DATA

DATA MASJID

1.	KOTA	115
2.	KAB.	151
	JUMLAH	266

2. SASARAN

MASJID (SELEKTIF PRIORITAS
RAWAN KAMTIBMAS)

3. PETUGAS / TIM

PETUGAS / TIM :

POLRES : 5 TIM @ 7 PERS
= 36 PERS

POLSEK : 46 TIM @ 5 PERS
= 265 PERS

JUMLAH : 51 TIM
= 300 PERS

4. GIAT / CB (CONSIGNES)

- 11.00 WIB APEL :
POLRES DIPIMPIN
KABAGMIN
POLSEK DIPIMPIN KA/
WAKA POLSEK
- SHOLAT BERSAMA
- SILAHTURRAHMI
- KOMUNIKASI
- KOORDINASI
- PESAN KAMTIBMAS
- KEMITRAAN

5. KODAL / PADAL

KODAL

- SUMBANGAN WAJIB Rp. 1000,-
- LAPORAN PELAKSANAAN

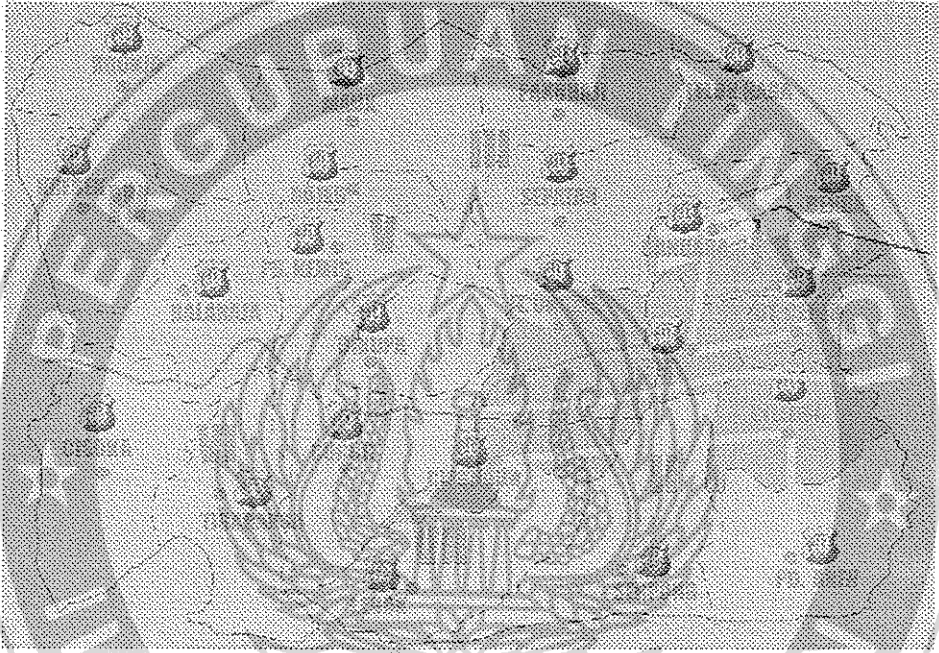
PADAL

- TIM POLRES :
SETIAP TIM DIPIMPIN 1 PA.
- TIM POLSEK :
SETIAP TIM DIPIMPIN PA/BATI.

DIAWASI

- KANIT
- KAPOLSEK
- KASAT
- KABAGMIN
- KAPOLRES

5. PROGRAM RAYONISASI



1. KETERANGAN / DATA :

- POLRES TNG. = 23 POLSEK
- RAYONISASI = 7 RAYON

2. SASARAN

- BID. PEMBINAAN
- BID. OPERASIONAL

3. KUAT PERS

- RAYON I s/d VII = 920 PERS

4. GIAT / CB (CONSIGNES)

- MELAKSANAKAN BID. PEMBINAAN DAN BID. OPERASIONAL SECARA BERSAMA-SAMA

5. KODAL / PADAL

KODAL

- LAKS. KEGIATAN
- LAPORAN KEGIATAN
- ANEV

PADAL

- PA YG DITUNJUK

1. KETERANGAN DATA

RAYONISASI

NO	KES	KUAT	PADAL
I.	TANGERANG	68	TNG
	BATU CEPER	49	III
	BENDA	35	
	BANDARA SH	64	
	TELUK NAGA	28	
		244	
II.	CIPONDOH	51	TNG
	CILEDUG	61	VII
	PD. AREN	49	
		161	
III.	MAUK	24	KAPR
	PAKUHAJI	22	IM
	SEPATAN	27	
		73	
IV.	BALARAJA	38	TNG
	KRONJO	21	VI
	KRESEK	25	
		84	
V.	RAJEG	26	TNG
	PASAR KEMIS	38	VIII
	JATIUWUNG	51	
		115	
VI.	CISOKA	28	TNG
	TIGA RAKSA	27	V
	CIKUPA	46	
		101	
VII.	CURUG	48	TNG
	LEGOK	37	IV
	SERPONG	57	
		142	

2. SASARAN

- SETIAP KEGIATAN MASYARAKAT

3. KUAT PERS

RAYON I s/d VII = 920 PERS

4. GIAT RAYON

a. BID BIN

- OLAH RAGA BERSAMA
- UPACARA SENIN BERSAMA
- LATIHAN BERSAMA

b. BID. OPS.

- GELAR PERKARA
- PATROLI BERSAMA
- OFENSIF / RAZIA
- BACK UP AWAL PERKUATAN (KERUSUHAN MASSA)

5. KODAL / PADAL

KODAL

- LAPORAN KEGIATAN RAYON

PADAL

● PA YG DITUNJUK

- KANIT
- KAPOLSEK
- KASAT
- KABAGMIN
- KAPOLRES